

## **ANALISIS FAKTOR PENDORONG KEPENTINGAN NASIONAL FILIPINA DALAM KERJA SAMA PERTAHANAN DENGAN AMERIKA SERIKAT PADA PERIODE 2021-2024**

**Muhamad Bassarewan<sup>1</sup>**

1. Program Studi Magister Hubungan Internasional Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi, Indonesia

### **ABSTRACT**

The beginning of Philippine independence provided several domestic problems that were quite difficult to overcome by themselves, so that in the end the Philippines opened a partnership or bilateral cooperation with the United States to assist their post-independence domestic development. Apart from helping their domestic development, the Philippines also needs US assistance in developing its military capabilities to fight various threats such as separatist movements in the southern region and disputes with China in the South China Sea region. However, the Duterte leadership said that the Philippines wanted to get rid of their dependence on the United States and wanted to live in full sovereignty. In the end, it becomes a question of what drives national interests that make the Philippines maintain defense cooperation with the United States. This study used a qualitative approach with descriptive analysis type, the data analysis technique used in this study was through library research and observation. In conclusion, there is a national interest in the form of domestic development and maritime security in the South China Sea region.

**Keywords:** Bilateral Cooperation, National Interest, Dependence, Maritime Security, South China Sea.

### **ABSTRAK**

Awal kemerdekaan Filipina memberikan beberapa permasalahan domestik yang cukup sulit untuk diatasi oleh diri mereka sendiri, sehingga pada akhirnya Filipina membuka kemitraan atau kerja sama bilateral dengan Amerika Serikat untuk membantu pembangunan domestik mereka pasca kemerdekaan. Selain untuk membantu pembangunan domestik mereka, Filipina juga membutuhkan bantuan Amerika Serikat dalam pengembangan kapabilitas militernya untuk melawan berbagai ancaman seperti gerakan separatisme di wilayah selatan dan sengketa dengan China di wilayah Laut China Selatan. Namun, kepemimpinan Duterte mengatakan bahwa Filipina ingin menghilangkan ketergantungan mereka dengan Amerika Serikat dan ingin hidup dalam kedaulatan penuh. Pada akhirnya menjadi pertanyaan dorongan kepentingan nasional apa yang menjadikan Filipina tetap menjalin kerja sama pertahanan dengan Amerika Serikat. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan tipe analisis secara deskriptif, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan dan observasi. Kesimpulannya terdapat kepentingan nasional berupa pembangunan domestik dan keamanan maritim di wilayah Laut China Selatan.

**Kata Kunci:** Kerja Sama Bilateral, Kepentingan Nasional, Ketergantungan, Keamanan Maritim, Laut China Selatan.

## PENDAHULUAN

Sektor pertahanan merupakan aspek yang sangat penting bagi setiap negara di dunia, hal ini tentu saja untuk menjaga kedaulatan negara tersebut dari berbagai ancaman yang ada dari sumber eksternal maupun internal dengan menghasilkan sebuah kondisi aman atau kebebasan terhadap ancaman-ancaman tadi. Kedaulatan yang dimiliki oleh sebuah negara menjadi suatu alasan pasti bagi mereka untuk memiliki keamanan teritorial yang kuat, sehingga keutuhan dan keselamatan bangsa dari ancaman ataupun gangguan yang ada merupakan tanggung jawab dari sebuah negara.

Pembahasan mengenai sektor pertahanan tidak akan terlepas dari aspek keamanan, sehingga dalam hal ini sebuah sistem pertahanan negara digunakan untuk menciptakan keamanan negara tersebut dari berbagai ancaman yang ada. Arnold Wolfers berpendapat bahwa kondisi aman dapat terjadi ketika tiada ancaman terhadap suatu nilai atau ketiadaan ketakutan terhadap serangan-serangan pada nilai tersebut (Barry Buzan, 1991). Salah satu permasalahan keamanan yang sangat mengemuka pada beberapa dekade terakhir terjadi pada sengketa keamanan di wilayah Laut China Selatan.

Pada kondisi yang terjadi di wilayah Laut China Selatan, China dianggap sebagai ancaman yang sangat besar bagi upaya pencapaian perdamaian dari segala sengketa yang terjadi di kawasan laut tersebut. Pada akhirnya agresifitas China ini mulai terekam sejak tahun 1947 dengan dikeluarkannya sebuah peta wilayah maritim yang berisi garis-garis teritorial atau *nine dash line* yang bersinggungan langsung dengan beberapa batas lautan negara ASEAN seperti Malaysia, Vietnam, Brunei Darussalam, Filipina, serta Indonesia. Pada akhirnya China semakin memanas dengan memberikan peta terkait pada pihak PBB yang tentu saja disusul oleh adanya penolakan atau protes dari negara-negara yang memiliki kepentingan di Laut China Selatan seperti masalah tentang wilayah.

Pada akhirnya dengan adanya China dengan klaim *nine dash line*-nya mengakibatkan adanya tumpang tindih formal-legal yang terjadi di wilayah Laut China Selatan, dalam hal ini terdapat ancaman yang menjadikan negara-negara di sekitar wilayah Laut China Selatan memiliki persepsinya masing-masing dalam menginterpretasikan wilayah teritorial mereka di Laut China Selatan. Klaim China di wilayah Laut China Selatan menjadi sebuah permasalahan tersendiri dikarenakan seakan-akan melakukan segala kegiatan maritim secara bebas di atas wilayah negara lainnya.

Ancaman China di sekitar wilayah LCS ditujukan sejak meningkatnya anggaran militer yang dimiliki oleh negara tersebut, hingga pada akhirnya terus terjadi peningkatan hingga tahun 2021. Perkembangan atau peningkatan dari anggaran pertahanan yang dimiliki oleh China menjadi salah satu bukti dari agresifitas China di wilayah Laut China Selatan.

Dominasi China di wilayah Laut China Selatan merupakan sesuatu yang sangat penting mengingat banyaknya negara-negara di dunia yang memiliki kepentingan di wilayah strategis tersebut, dalam hal ini Amerika Serikat menjadi salah satu negara yang memiliki kepentingan yang cukup besar dalam wilayah Asia Pasifik terutama di wilayah Laut China Selatan. Pada akhirnya Amerika Serikat juga merasa bahwa dominasi China di wilayah Laut China Selatan merupakan sebuah ancaman tersendiri bagi mereka, yakni berpengaruh pada aspek penyebaran pengaruh mereka di wilayah Asia Pasifik dan adanya jalur navigasi bebas yang mereka gunakan untuk pelayaran internasional (M. Bahri, 2016). Dominasi China di wilayah LCS juga dianggap sebagai sebuah ancaman bagi tatanan internasional, sehingga diperlukan upaya untuk membendung dominasi tersebut seperti pada era pemerintahan Obama yang mana Amerika

Serikat membentuk kebijakan *Rebalancing* sebagai peningkatan perhatian AS di Laut China Selatan.

Selain Amerika Serikat, negara yang secara langsung menghadapi ancaman dari agresifitas China di LCS adalah Filipina. Filipina bersitegang dengan China dikarenakan China mengklaim teritorialnya tepatnya meliputi Kepulauan Spratly. Atas klaim Kepulauan Spratly yang dilakukan oleh China, Filipina merasa terancam karena Kepulauan Spratly merupakan teritorialnya yang hanya berjarak 330 km dari Pulau Palawan. Selain sengketa di Kepulauan Spratly, Filipina dan China juga bersitegang soal kepemilikan teritorial di Gugusan Pulau Karang Scarborough. Sebagai dua negara yang memiliki kepentingan di Laut China Selatan, Filipina dan Amerika Serikat merasa bahwa perlu melakukan tindakan untuk mengatasi ancaman-ancaman dari agresifitas China tersebut. Pada dasarnya Amerika Serikat dan Filipina telah terikat secara historis sebagai negara bekas kolonial dan jajahannya, kedua negara telah memiliki sejarah panjang. Kedua negara tercatat telah menandatangani Mutual Defence Treaty Between the Republic of the Phillipines and the United States of America pada 30 Agustus 1951 sebagai bentuk dari pengikatan kedua negara menjadi sebuah negara aliansi. Meskipun hubungan Amerika Serikat dan Filipina memburuk pada taun 1992 dimana AS menarik semua pasukan militernya di beberapa basis militer seperti di Subic Bay, Clark Air Base, Aliansi antar Filipina dan Amerika Serikat dilanjut dengan penandatanganan Visiting Forces Agreement 1999 yang merupakan kerangka legal atas hadirnya personel militer Amerika Serikat di Filipina. mengundang ketertarikan internasional untuk menyebarkan pengaruhnya dan mewujudkan kepentingan nasional mereka akan hal itu.

Pada akhirnya Amerika Serikat memberikan fokus dalam kebijakan luar negerinya di kawasan Asia Pasifik dalam hubungannya dengan Filipina, dalam hal ini ditunjukkan dengan adanya kerja sama yang dilaksanakan sejak kunjungan Hillary Clinton ke Manila yang menghasilkan sebuah deklarasi yang menegaskan aliansi di antara kedua negara (Whaley Floyd). Pada akhirnya keadaan atau ancaman yang Filipina dan Amerika Serikat rasakan di wilayah Laut China Selatan merupakan salah satu bentuk ancaman bersama dari mereka untuk membentuk suatu aliansi pertahanan.

## **KERANGKA ANALITIK**

Kerangka analitik yang akan digunakan pada penelitian ini adalah teori Neo-Realisme. Teori ini menjelaskan mengenai negara terdiri atas struktur sistemis yang masih memungkinkan kerja sama yang didasari kepentingan nasional (keuntungan relatif, zero sum game), begitu pula negara yang harus dipandang dari segala aspek strukturalnya (bukan hanya kekuasaan dan politik saja). Pada anggapan teori ini sistem internasional bersifat anarki, dalam hal ini negara dituntut dapat *survive* dengan keadaan (sebagai suatu kepentingan nasional). Sistem internasional yang anarki menyebabkan tidak adanya suatu otoritas yang mengikat atau memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari yang lainnya, sehingga setiap negara didorong untuk mengedepankan prinsip *self-help* (Kenneth N. Waltz, 1975). Neorealisme sebenarnya tidak percaya bahwa negara dapat bekerjasama satu sama lain dengan tulus. Jika mereka melakukannya, mereka sebenarnya tidak melakukannya dengan sepenuh hati, karena mereka lebih fokus pada seberapa besar akan mendapatkan manfaat dari pihak lain. Pendekatan neo-realisme akan cukup menonjol pada penelitian ini dikarenakan peneliti membahas mengenai adanya faktor pendorong khusus bagi Filipina untuk mau melakukan kerja sama pertahanan dengan Amerika Serikat, dalam hal ini terdapat suatu kepentingan nasional yang dimiliki oleh Filipina sebagai salah satu indikator mereka untuk memenuhi kebutuhan negaranya.

Pemahaman dalam pendekatan neo-realisme menjadikan aktor dalam hubungan internasional merupakan sistem itu sendiri, dalam hal ini negara merupakan aktor yang dominan dalam hubungan internasional. Neorealis menjadikan isu keamanan menjadi fokus utama dalam sudut pandang mereka, yang mana hal ini merupakan warisan dari pandangan realisme yang menunjukkan bahwa sistem internasional masih berada pada keadaan yang anarki. Pada akhirnya pemahaman tersebut akan menghasilkan kondisi dilema keamanan yang menuntut negara-negara di dunia untuk meningkatkan kapabilitas kekuatannya masing-masing, hal ini digunakan untuk meningkatkan stabilitas pertahanan dan kekuasaan di dunia untuk mempertahankan perdamaian.

Neorealisme menjadi sangat cocok mengingat peneliti membahas mengenai proses pencapaian kepentingan nasional yang dimiliki oleh Filipina dalam aspek pertahanan dan keamanan, dalam hal ini Filipina ingin mencapai pertahanan dan keamanan yang mumpuni melalui pengembangan kapabilitas militer yang mereka miliki. Keadaan ancaman yang kian meningkat menyebabkan negara-negara di dunia pada akhirnya memilih untuk bekerja sama untuk memaksimalkan kekuatan yang mereka pilih, hal ini dijadikan pilihan dibandingkan mereka harus meningkatkan kekuatan secara mandiri namun hasil yang didapatkan sedikit atau bahkan nihil. Pada akhirnya pengembangan sektor pertahanan dan keamanan menjadi sesuatu yang sangat penting untuk mengimbangi kekuatan di dunia internasional dan meningkatkan keamanan nasional suatu negara dari ancaman-ancaman yang berasal dari internal maupun eksternal, terkhusus Filipina yang merasa sangat terancam dari adanya dominasi China di wilayah Laut China Selatan.

Seluruh pembahasan peneliti terkait permasalahan terkait sejalan dengan penjelasan anarki yang menyebutkan tidak ada suatu otoritas pusat yang dapat memaksakan kehendak terhadap suatu negara, dalam hal ini aktor-aktor di dalam dunia internasional berusaha untuk mencapai keuntungan relatif melalui hubungan kerja sama dengan negara lain. Namun, tentu saja hubungan yang dilaksanakan didasari oleh kepentingan nasional tertentu yang dimiliki oleh negara terkait untuk memaksimalkan kekuatan mereka, terkhusus dalam upaya peningkatan kapabilitas militer melalui hubungan kerja sama antar dua negara atau lebih.

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan kualitatif menjadi metode penelitian yang digunakan dalam penelitian kali ini dikarenakan memiliki fokus penelitian dan kajian yang terkait pada fenomena atau peristiwa sosial yang berlangsung di tengah-tengah masyarakat sebagai subjek penelitiannya, pada pendekatan kualitatif terdapat berbagai aspek penelitian yang dibahas seperti perspektif, motivasi, aktivitas, sudut pandang, hingga perilaku masyarakat secara langsung yang diteliti secara mendalam menggunakan metode terkait (Lexy J. Moleong, 2006). Penjelasan terkait menjelaskan bahwa metode kualitatif merupakan pendekatan yang memiliki fokus bahasan dalam permasalahan atau isu sosial, yakni pendekatan yang digunakan dalam meneliti, menganalisa, mengobservasi, hingga memahami secara deskriptif melalui kejadian-kejadian yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Pada akhirnya pendekatan ini menjadi metode penelitian yang cocok untuk digunakan dalam permasalahan sosial seperti ini, keadaan tersebut didasari oleh kenyataan bahwa pendalaman permasalahan dalam metode ini berfokus mengenai tingkah laku manusia dengan segala faktor-faktor atau alasan yang mempengaruhi tindakan tersebut.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Kepentingan Nasional Filipina dalam Kerja Sama Pertahanan dengan Amerika Serikat**

Setiap negara di dunia pada akhirnya memiliki tujuan dan sasaran dalam kepentingan nasional yang mereka buat, sehingga pada akhirnya negara memiliki kepentingan tersendiri dalam menjelaskan dan memahami potensi yang mereka miliki untuk diinterpretasikan kepada negara lain bagi perkembangan hubungan kerja sama di antara mereka dalam rangka pembangunan dan perkembangan internasional. Pada dasarnya pandangan neorealis berpendapat bahwa memang negara-negara di dunia perlu melakukan *self-help* untuk meningkatkan segala bentuk kemampuan yang ingin mereka dapatkan sebagai perwujudan kepentingan nasional, namun pada akhirnya negara-negara di dunia sadar bahwa akan sulit apabila mereka melakukannya sendiri sehingga terbentuk suatu kerja sama walaupun memiliki latar belakang untuk mengedepankan kepentingan nasional.

Pada akhirnya seluruh bentuk kerja sama yang dilaksanakan oleh negara-negara di dunia, dalam pandangan neorealis hal tersebut semata-mata dilakukan atas dorongan dari alasan-alasan yang menginterpretasikan tujuan dan kepentingan nasional dari masing-masing negara yang terlibat. Keadaan ini merupakan bentuk kesadaran tersendiri bagi masyarakat internasional dalam melakukan hubungan kerja sama dengan pihak-pihak lain, dalam hal ini memastikan bahwa tujuan-tujuan yang dilaksanakan oleh pihak lain untuk bekerja sama dengan dirinya memiliki kecenderungan yang serupa sehingga proses pencapaiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Pada akhirnya Filipina memberikan berbagai pendapat mengenai kepentingan nasional apa yang sebenarnya mereka cari dari berbagai kerja sama yang dilaksanakan oleh mereka dengan berbagai mitra dari luar negeri, dalam hal ini Filipina akan mengedepankan kepentingan mereka untuk membentuk suatu integrasi, keamanan, hingga pembangunan domestik.

Pembahasan mengenai kepentingan nasional Filipina dalam kerja sama ini dibahas melalui teori atau konsep kepentingan nasional yang disampaikan oleh Hans J. Morgenthau, menurutnya kepentingan nasional memiliki dua konsep utama yaitu kekuasaan (*power*) dan kepentingan (*interest*) yang dijadikan instrumen dalam melakukan hubungan luar negeri. Morgenthau memaparkan tiga poin penting dalam kepentingan nasional:

- Perlindungan terhadap identitas fisik, dalam hal ini untuk mempertahankan integritas wilayah suatu negara.
- Perlindungan terhadap identitas politik, dalam hal ini mempertahankan rezim ekonomi dan politik negara.
- Perlindungan terhadap kultur kebudayaan, dalam hal ini mempertahankan aspek sejarah dan linguistik (*Op. Cit. Yani*).

Pada pembahasan mengenai kepentingan nasional yang dimiliki oleh Indonesia sebagai faktor pendorong dalam melakukan kerja sama pertahanan dengan Amerika Serikat, peneliti menggunakan konsep kepentingan nasional yang bersifat vital dan non-vital. Kepentingan Vital menjelaskan bagaimana suatu kepentingan nasional ada dan dapat digunakan, dalam hal ini terdapat suatu keadaan yang sangat penting sehingga negara perlu segera memutuskan tindakan dalam permasalahan tersebut. Kepentingan non-vital atau sekunder merupakan kepentingan yang bersifat jangka panjang (waktu yang lama), proses pencapaian kepentingan ini berlangsung cukup lama namun fungsi dan hasilnya dapat dirasakan oleh negara tersebut melalui tindakan-tindakan yang sesuai (Aleksius Jemadu, 2008). Berikut merupakan

kepentingan nasional Filipina (Vital dan Non-Vital) untuk bekerja sama dengan AS dalam bidang pertahanan dan keamanan:

### **A.1. Kepentingan Vital**

Kepentingan vital suatu negara pada dasarnya berkaitan dengan situasi dan kondisi negara tersebut, dalam hal ini terdapat suatu tujuan penting yang berpengaruh pada suatu negara. Pada keadaan ini terdapat beberapa tujuan nasional yang mendasar bagi sebuah negara seperti integrasi nasional, integrasi teritorial, integrasi politik, keamanan nasional, tujuan mengenai kekuasaan dan ideologi, kesejahteraan nasional dan beberapa kepentingan lainnya yang dapat dicapai melalui beberapa bentuk kerja sama seperti multilateral, bilateral, hingga trilateral.

Kerja sama antar negara yang terjadi dalam lingkup kepentingan vital ini menjadi salah satu gambaran utama dari perwujudan konsep kebijakan luar negeri dan kepentingan nasional dalam teori neorealisme, pada akhirnya *national security* menjadi sebuah fokus bahasan bagi peneliti dalam menanggapi kepentingan nasional Filipina terkait kesiapan militer mereka untuk menghadapi berbagai permasalahan yang berkaitan dengan keamanan nasional. Keadaan ini membahas mengenai kepentingan utama yang dimiliki oleh Filipina untuk melakukan kerja sama intensif dalam sektor pertahanan dan keamanan dengan Amerika Serikat.

Kepentingan vital yang diangkat dalam penelitian ini berkaitan dengan tiga poin utama yakni pembangunan domestik, sengketa di wilayah laut China Selatan, serta beberapa isu perompak, terorisme, atau gerakan separatisme yang mengancam kedaulatan Filipina. Tiga poin ini menjadi sesuatu yang sangat dikedepankan bagi Filipina untuk dijadikan alasan agar tetap bekerja sama dalam berbagai bidang dengan Amerika Serikat.

### **A.2. Kepentingan Non-Vital**

Kepentingan non-vital dapat kita sebut sebagai tujuan tingkat kedua daripada kepentingan vital yang akan sangat berpengaruh pada keberlangsungan keamanan nasional suatu negara, namun kepentingan ini juga cukup memberikan hasil yang baik pada suatu negara walaupun manfaatnya akan terasa dalam jangka waktu yang panjang. Pada akhirnya kerja sama yang dilakukan oleh Filipina dan Amerika Serikat tidak hanya berguna atau bermanfaat bagi sektor pertahanan dan keamanan saja, melainkan terdapat beberapa bidang-bidang lainnya yang akan terpacu oleh adanya kerja sama tersebut.

Kerja sama dalam aspek pertahanan dan keamanan yang dilaksanakan oleh Filipina dan Amerika Serikat menjadi sebuah pendorong bagi terciptanya hubungan yang harmonis di antara kedua negara, terlebih pada awalnya kedua negara tergabung dalam suatu aliansi pertahanan untuk menghalau pengaruh komunis saat hingga setelah perang dingin. Kerja sama di antara keduanya mulai meningkat sejak hubungan kerja sama pertahanan untuk mengatasi terorisme di wilayah Filipina Selatan, yang mana hal ini menjadi kepentingan dari kedua negara untuk melakukan perlawanan terhadap terorisme (*Global War on Terror*). Kerja sama pertahanan dan keamanan ini menjadi sesuatu yang sangat krusial dan penting di antara keduanya terutama dengan dilatarbelakanginya kerja sama tersebut dengan agresifitas China di Laut China Selatan, pada akhirnya hubungan timbal balik positif yang tercipta di antara keduanya menjadi sesuatu yang positif untuk membuka jalur diplomasi dalam mempertahankan harmonisasi mereka.

Kerja sama dalam berbagai aspek yang dilaksanakan oleh Filipina dan Amerika Serikat

akan memberikan berbagai dampak positif yang dapat dirasakan dalam jangka panjang, sehingga hal ini merupakan sesuatu yang baik bagi kedua pihak untuk mendorong keduanya agar memperluas kembali kerja sama yang dilaksanakan hingga pada berbagai bidang yang berpotensi bermanfaat. Di samping kerja sama pertahanan dan keamanan yang telah dilaksanakan oleh keduanya, kerja sama tersebut telah berperan penting untuk membentuk hubungan baik di antara kedua negara dengan membentuk suatu kepercayaan sendiri yang memunculkan potensi besar bagi kerja sama ke depannya.

Kerja sama yang dilakukan oleh Filipina dengan Amerika Serikat juga akan memberikan dampak positif dalam jangka waktu yang lumayan panjang, keadaan ini berkaitan dengan adanya transfer teknologi yang menjadi salah satu agenda dalam kerja sama terkait. Filipina dapat memanfaatkan pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh AS terkait teknologi militer terutama dalam matra laut, sehingga hal ini menjadi sesuatu yang positif bagi industri pertahanan Filipina yang dapat mengembangkan diri menjadi lebih baik untuk memenuhi kebutuhan militer negaranya sendiri. Pada akhirnya kedua negara tidak hanya memiliki kepentingan masing-masing dalam suatu kerja sama, namun menjadi sebuah media untuk membangun hubungan baik di antara keduanya. Kerja sama ini akan memberikan potensi positif bagi kedua negara untuk melebarkan sayapnya pada berbagai sektor potensial lainnya.

## **B. Analisis tentang Relevansi Kepentingan Nasional Filipina**

Kepentingan Nasional yang dimiliki oleh Filipina dalam kerja sama dengan Amerika Serikat diklasifikasikan dalam kepentingan vital dan non-vital, dalam keadaan ini terdapat tiga poin utama yang dijadikan oleh Filipina sebagai alasan mereka untuk senantiasa bekerja sama dengan Amerika Serikat. Tiga poin tersebut adalah keadaan domestik Filipina yang masih membutuhkan perhatian besar, kondisi sengketa di wilayah Laut China Selatan, serta ancaman kedaulatan yang berkaitan dengan keamanan maritim yang diancam dengan keberadaan kelompok atau gerakan separatis.

Kepentingan nasional yang dimiliki oleh Filipina dianggap telah tepat sasaran untuk tetap dipertahankan sebagai latar belakang untuk bekerja sama dengan Amerika Serikat, dalam hal ini Filipina ingin mengembangkan perekonomian domestik dan kapabilitas militernya untuk memenuhi ketiga kepentingan nasional yang mereka miliki. Pada akhirnya kepentingan nasional Filipina memberikan dorongan besar terhadap terjadinya kerja sama pertahanan dan keamanan bersama Amerika Serikat, walaupun keadaan ini dianggap sebuah ketergantungan yang buruk pada sebuah negara berdaulat.

## **KESIMPULAN**

Filipina memiliki berbagai kepentingan nasional yang menjadi faktor pendorong utama dari mereka yang berkeinginan untuk melaksanakan hubungan kerja sama pertahanan dengan AS, dalam hal ini Filipina memiliki berbagai kepentingan vital dan non-vital yang berusaha diperjuangkan atau dicapai melalui kerja sama yang dilaksanakan. Filipina memiliki kepentingan nasional yang menjadi pendorong kerja sama terkait, keadaan ini merupakan perwujudan teori neorealisme yang mana negara masih menjadi aktor utama dalam hubungan internasional, dalam hal ini negara juga perlu meningkatkan sektor pertahanan dan keamanannya di tengah-tengah kondisi sistem internasional yang anarki, dalam keadaan ini negara bisa meningkatkan kekuatannya sendiri dengan mandiri ataupun melakukan kerja sama dengan negara lain walaupun akan tercipta keuntungan relatif, sehingga pada akhirnya terdapat

kepentingan nasional di masing-masing pihak yang berkerja sama sebagai pendorong dari keadaan tersebut.

Pada keadaan ini Filipina memiliki kepentingan vital berupa keamanan nasional, sehingga Filipina ingin meningkatkan kapabilitas pertahanan dan keamanannya untuk meningkatkan kondisi keamanan maritim mereka di wilayah regionalnya sendiri. Pada keadaan ini kita mengulas mengenai Filipina yang memiliki ancaman potensial dari permasalahan yang mereka alami dari sengketa dengan China di wilayah Laut China Selatan serta permasalahan yang menimpa mereka dari beberapa gerakan atau kelompok separatisme yang mengancam kedaulatan Filipina, selain itu Filipina juga ingin meningkatkan kekuatan mereka sebagai pendorong atau pendukung dari upaya mereka untuk meningkatkan kemampuan domestik mereka untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

### DAFTAR PUSTAKA

Aleksius Jemadu, *Politik Global dalam Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), 67 – 69.

Barry Buzan, *People, States, and Fear: An Agenda for International Security Studies In the Post-Cold War Era* (Great Britain: Harvester Wheatsheaf, 1991), 17.

Kenneth N. Waltz, *Theory of International Politics* (California: Addison-Wesley Publishing Company, 1979)

Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, edisi Revisi (Bandung, 2006) hlm: 10

M. Bahri, “*Kebijakan Freedom of Navigation Amerika Serikat di Laut China Selatan*”, Skripsi: Universitas Hasanuddin, 2016, 189.

*Op. Cit. Yani, 17.*

Whaley Floyd, “*Clinton Reaffirm Military Ties With the Philippines*”, New York Times, diakses dari <https://www.nytimes.com/2011/11/17/world/asia/clinton-reaffirm-military-ties-with-the-philippines.html>